



EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2005-2025

**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektorial
Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas**

Disampaikan dalam “*Workshop* Penyusunan Evaluasi RPJPD 2005-2025 dan Penyusunan
Ranwal RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2045 – Bappeda Provinsi Jambi”

1 September 2022



CAKUPAN

1. **DASAR EVALUASI PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025**
2. **PENAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025**
3. **MISI PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025**
4. **KETERKAITAN MISI DENGAN BIDANG PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005-2025**
5. **RUANG LINGKUP DAN METODE EVALUASI PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025**
6. **CONTOH HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025 (BIDANG EKONOMI)**
7. **REKOMENDASI UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN KE DEPAN**



UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 8)

"Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan nasional."



UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Pasal 7 Ayat 1)

"Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional."

Sembilan Bidang Pembangunan Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 (Sesuai Bidang Pembangunan pada RPJPN 2005-2025 sebagaimana UU No.17/2007)

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

"Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."



RPJMN ke-1 (2005–2009)

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang **aman dan damai**, yang **adil dan demokratis**, dan yang tingkat **kesejahteraan** rakyatnya meningkat.



RPJMN ke-2 (2010–2014)

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya **peningkatan kualitas SDM** termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta **penguatan daya saing perekonomian**.



RPJMN ke-3 (2015–2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian **daya saing kompetitif perekonomian** berlandaskan keunggulan **SDA dan SDM berkualitas** serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.



RPJMN ke-4 (2020–2024)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh** berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas** dan **berdaya saing**.



1

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila



2

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing



3

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum



4

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu



5

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan



6

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari



7

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional



8

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

01

“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Bidang Hukum dan Aparatur.

02

“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”



1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Bidang Ekonomi.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Hukum dan Aparatur.
6. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

03

“Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum”

1. Bidang Politik.
2. Bidang Hukum dan Aparatur.

04

“Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu”



1. Bidang Pertahanan dan Keamanan.

05

“Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan”

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Bidang Ekonomi.
3. Bidang Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

06

“Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”



1. Bidang Sarana dan Prasarana.
2. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

07

“Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”

1. Bidang Ekonomi.
2. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Bidang Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

08

“Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional”



Bidang Politik.



RUANG LINGKUP DAN METODE EVALUASI PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025

RPJPN 2005-2025

Visi

Misi

Sasaran Pokok

Arah Kebijakan

Sembilan Bidang Pembangunan

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Ekonomi;
3. Sarana dan Prasarana
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Politik;
6. Pertahanan dan Keamanan;
7. Hukum dan Aparatur;
8. Wilayah dan Tata Ruang;
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

EVALUASI PELAKSANAAN RPJPN 2005-2025

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Penilaian kinerja pembangunan selama 20 tahun secara makro dan mempertimbangkan upaya disagregasi wilayah

RPJMN I

RPJMN II

RPJMN III

RPJMN IV

INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Makro Pembangunan
2. Indikator Terpilih Mewakili Pencapaian 9 Bidang Pembangunan

PENILAIAN KINERJA

1. Matriks Kertas Kerja
2. Narasi *Self Assessment milestone I (2005-2014) milestone II (2014-2024, dengan memperhatikan kondisi COVID-19)*

1. Trend Analysis

2. Gap Analysis

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN STRATEGIS

Identifikasi secara spesifik tentang "bagaimana" efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan "mengapa"

KEBIJAKAN STRATEGIS
Terpilih Mewakili 9 Bidang Pembangunan

ANALISIS DESKRIPTIF

- (1) Pelaksanaan;
- (2) Latar Belakang;
- (3) Organisasi/Kelembagaan;
- (4) Regulasi;
- (5) *Input-Aktivitas-Output*

BENCHMARKING
China dan Thailand

EVALUASI DAMPAK/MANFAAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Analisis tentang "apa" dampak atau kebermanfaatannya yang dirasakan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah

PERNYATAAN DAMPAK/MANFAAT
Dirumuskan berdasarkan kebijakan strategis dan indikator kinerja terpilih

ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF

Data Primer

survei persepsi (kuesioner *online* dan *offline*)

Total: 1.927 responden

(kategori responden rumah tangga, pelaku usaha, birokrat, dan akademisi)

1. Analisis Deskriptif

2. Importance Performance Analysis (IPA)



(Contoh Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025)

BIDANG EKONOMI

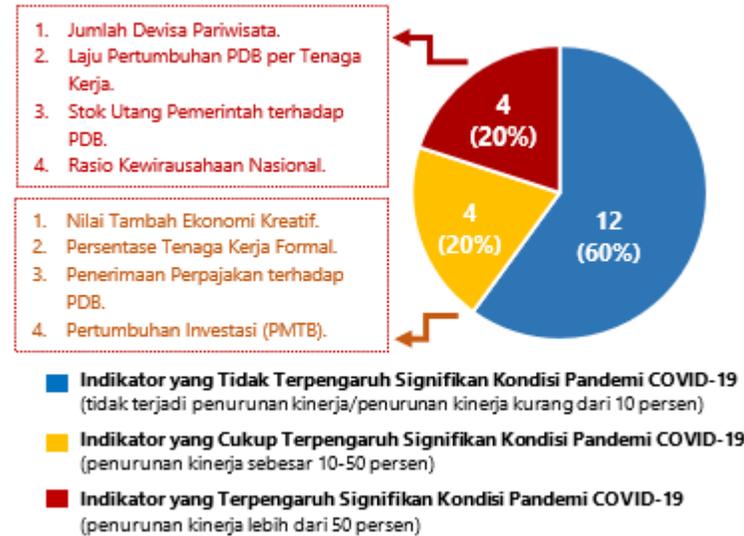
Kinerja Bidang Ekonomi (dicerminkan oleh capaian 20 indikator) selama periode RPJPN 2005-2025 memiliki perkembangan kinerja yang cenderung meningkat pada sebagian besar indikator (14 indikator – 70 persen).

Kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi sejumlah capaian indikator pembangunan ekonomi secara signifikan, dengan penurunan kinerja lebih dari 50 persen dibandingkan dari kondisi sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2005-2019) yaitu pada (1) jumlah devisa pariwisata, (2) laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (3) stok utang pemerintah terhadap PDB, dan (4) rasio kewirausahaan nasional. Sementara itu, indikator yang cukup terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19, dengan penurunan kinerja sebesar 10-50 persen, di antaranya (1) nilai tambah ekonomi kreatif, (2) persentase tenaga kerja formal, (3) penerimaan perpajakan terhadap PDB, dan (4) pertumbuhan investasi (PMTB). Sisanya sebanyak 12 indikator tidak terpengaruh secara signifikan atas kondisi pandemi COVID-19.

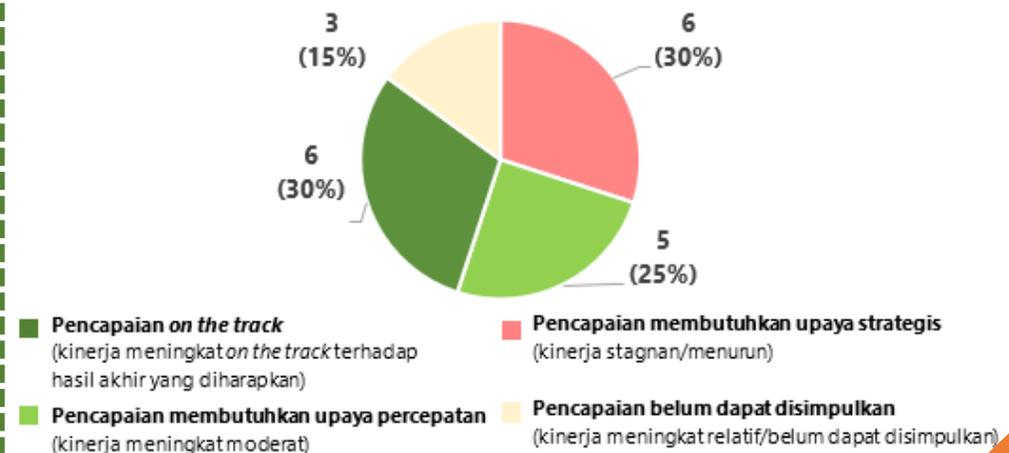
Kesimpulan akhir pencapaian kinerja

- Pencapaian yang sudah *on the track*** (6 dari 20 indikator) perlu mempertahankan kinerja dan dapat diperkirakan mencapai hasil akhir yang diharapkan, antara lain: (a) penyediaan lapangan kerja, (b) cadangan devisa, (c) kinerja koperasi, (d) realisasi investasi PMA dan PMDN, (e) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan, dan (f) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial.
- Pencapaian yang masih membutuhkan upaya percepatan** (5 dari 20 indikator) agar berhasil mencapai hasil akhir yang diharapkan, antara lain: (a) peningkatan sektor ekonomi kreatif, (b) stok utang pemerintah, (c) semangat dan jiwa kewirausahaan, (d) kinerja UMKM, dan (e) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan.
- Pencapaian yang masih membutuhkan upaya terobosan strategis**, mengingat kondisi perkembangannya yang cenderung menurun ataupun stagnan (6 dari 20 indikator), antara lain: (a) penerimaan devisa dari sektor pariwisata, (b) pertumbuhan sektor manufaktur, (c) peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, (d) penerimaan perpajakan, (e) pertumbuhan investasi, dan (f) peningkatan pendanaan bagi UMKM.

Jumlah Indikator Bidang Ekonomi Periode RPJPN 2005-2025 Berdasarkan Tingkat Pengaruh Kondisi Pandemi COVID-19



Jumlah Indikator Bidang Ekonomi Periode RPJPN 2005-2025 Berdasarkan Pencapaian Kinerja





KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

BIDANG EKONOMI ... (1/3)

INDIKATOR	CAPAIAN						HASIL YANG DIHARAPKAN (TAHUN 2024)	PERKEMBANGAN KINERJA	
	MILESTONE I 2005-2014			MILESTONE II 2005-2024				KONDISI SEBELUM PANDEMI COVID-19 (Hingga Tahun 2019)	KONDISI SECARA KESELURUHAN (Hingga Data Terkini)
	2005	2010	2014	2019	2020	2021			
1. Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Industri Manufaktur									
1. Jumlah Devisa Pariwisata (Miliar USD)	4,52	7,60	11,17	18,45	3,53	0,55	10,70-16,11	Meningkat (<i>on the track</i>)	Menurun
2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Triliun)	N/A	525	785	1.153	1.134	1.191	1.846	Meningkat (moderat)	Meningkat (moderat)
3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	24,35	22,04	21,08	19,70	19,88	19,15 (Triwulan III)	21,00	Menurun	Menurun
2. Ketenagakerjaan									
1. Penyediaan Lapangan Kerja (Juta Orang)	1,23	3,34	1,87	2,47	-0,30	2,60	2,70-3,00	Meningkat (<i>on the track</i>)	Meningkat (<i>on the track</i>)
2. Persentase Tenaga Kerja Formal (Persen)	30,73	33,07	40,62	44,12	39,53	40,55	N/A	Meningkat (relatif)	Meningkat (relatif)
3. Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja (Persen)	5,43	3,04	3,29	3,00	-1,84	1,19	3,70-4,50	Menurun	Menurun
3. Stabilitas Ekonomi dan Neraca Pembayaran									
1. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (Persen)	18,75	33,08	-2,64	-4,27	-0,61	41,50	9,80	Menurun	Meningkat (relatif)
2. Cadangan Devisa (Miliar USD)	34,70	96,20	111,90	129,20	135,90	145,90	159,50	Meningkat (<i>on the track</i>)	Meningkat (<i>on the track</i>)
3. Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (Persen)	12,51	10,54	10,85	9,76	8,33	9,11	10,70-12,30	Menurun	Menurun
4. Stok Utang Pemerintah terhadap PDB (Persen)	47,55	24,50	24,68	30,22	39,39	40,77	28,50-29,20	Meningkat (<i>on the track</i>)	Meningkat (moderat)



KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

BIDANG EKONOMI ... (2/3)

INDIKATOR	CAPAIAN						HASIL YANG DIHARAPKAN (TAHUN 2024)	PERKEMBANGAN KINERJA	
	MILESTONE I 2005-2014			MILESTONE II 2005-2024				KONDISI SEBELUM PANDEMI COVID-19 (Hingga Tahun 2019)	KONDISI SECARA KESELURUHAN (Hingga Data Terkini)
	2005	2010	2014	2019	2020	2021			
4. UMKM dan Koperasi									
1. Rasio Kewirausahaan Nasional (Persen)	2,75	2,80	3,43	3,27	2,93	2,88	4,00	Meningkat (moderat)	Meningkat (moderat)
2. Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	55,96	58,05	57,56	57,14	N/A	N/A	65,00	Meningkat (moderat)	Meningkat (moderat)
3. Kontribusi Koperasi terhadap PDB (Persen)	N/A	N/A	1,71	5,54	6,20	N/A	5,50	Meningkat (<i>on the track</i>)	Meningkat (<i>on the track</i>)
4. Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan (Persen)	50,70	21,77	19,74	19,55	20,75	19,53	22,00	Menurun	Menurun
5. Penanaman Modal									
1. Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp. Triliun)	118,4	208,0	494,7	809,6	826,3	901,0	1.239,3	Meningkat (<i>on the track</i>)	Meningkat (<i>on the track</i>)
2. Pertumbuhan Investasi (PMTB) (Persen)	10,90	8,50	4,40	4,50	-4,95	3,56	8,40	Menurun	Menurun
3. Peringkat Kemudahan Berusaha (Peringkat 0-189)	130	115	114	73	N/A	N/A	N/A	Meningkat (relatif)	Meningkat (relatif)
6. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Khusus									
1. Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan yang Difasilitasi dan Dikembangkan (KEK)	N/A	N/A	8	11	12	11	9 beroperasi 18 dikembangkan	Meningkat (moderat)	Meningkat (moderat)



KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

BIDANG EKONOMI ... (3/3)

INDIKATOR	CAPAIAN						HASIL YANG DIHARAPKAN (TAHUN 2024)	PERKEMBANGAN KINERJA	
	MILESTONE I 2005-2014			MILESTONE II 2005-2024				KONDISI SEBELUM PANDEMI COVID-19 (Hingga Tahun 2019)	KONDISI SECARA KESELURUHAN (Hingga Data Terkini)
	2005	2010	2014	2019	2020	2021			

7. Jaminan Sosial dan Layanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan

1. Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Persen)	N/A	N/A	N/A	15,00	30,00	51,36	100,00	Belum dapat disimpulkan	Meningkat (<i>on the track</i>)
2. Proporsi Penduduk yang Tercakup dalam Program Jaminan Sosial (Persen)	41,67	63,00	52,50	83,61	82,07	86,96	98,00	Meningkat (<i>on the track</i>)	Meningkat (<i>on the track</i>)

Kategori perkembangan kinerja

- Menurun, jika perkembangan kinerja sebesar <0 persen dari tahun *baseline* terhadap kondisi terkini maupun kondisi akhir yang diharapkan.
- Stagnan, jika perkembangan kinerja sebesar 0 persen dari tahun *baseline* terhadap kondisi terkini atau sebesar 0-15 persen dari tahun *baseline* terhadap kondisi akhir yang diharapkan.
- Meningkat:
 - (Moderat, jika perkembangan kinerja sebesar $>15 - <100$ persen dari tahun *baseline* terhadap kondisi akhir yang diharapkan;
 - On the track*, jika perkembangan kinerja ≥ 100 persen dari tahun *baseline* terhadap kondisi akhir yang diharapkan;
 - Relatif, jika perkembangan kinerja cenderung meningkat (>0 persen) dari tahun *baseline* terhadap kondisi terkini.
- Belum dapat disimpulkan, jika data tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat perbedaan satuan indikator antartahun.

Keterangan:

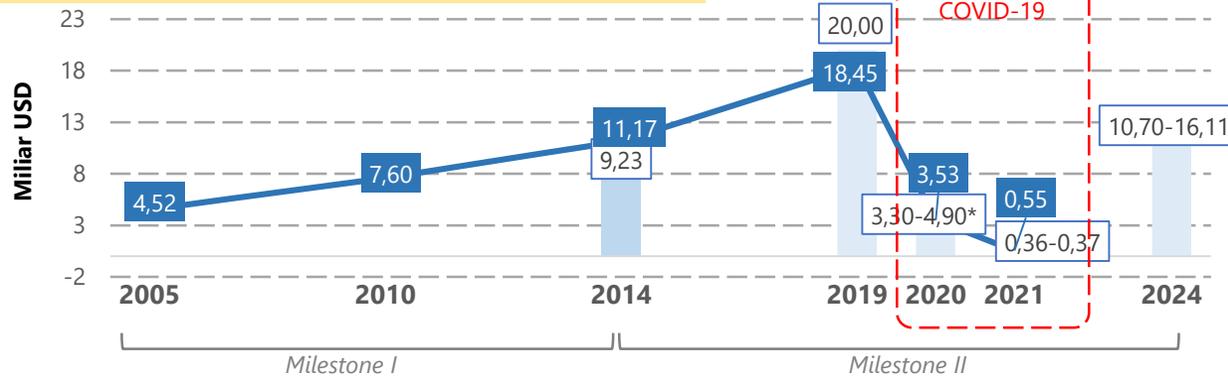
Rumus perhitungan perkembangan kinerja:

- (Rata-Rata Gabungan Pertumbuhan Tahunan Hingga Capaian Terkini/Rata-Rata Pertumbuhan untuk Mencapai Hasil yang Diharapkan) $\times 100\%$ --> Jika histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan.
- Rata-Rata Gabungan Pertumbuhan Tahunan Hingga Capaian Terkini $\times 100\%$ --> Jika histori data relatif kurang konsisten dan/atau tidak memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan.

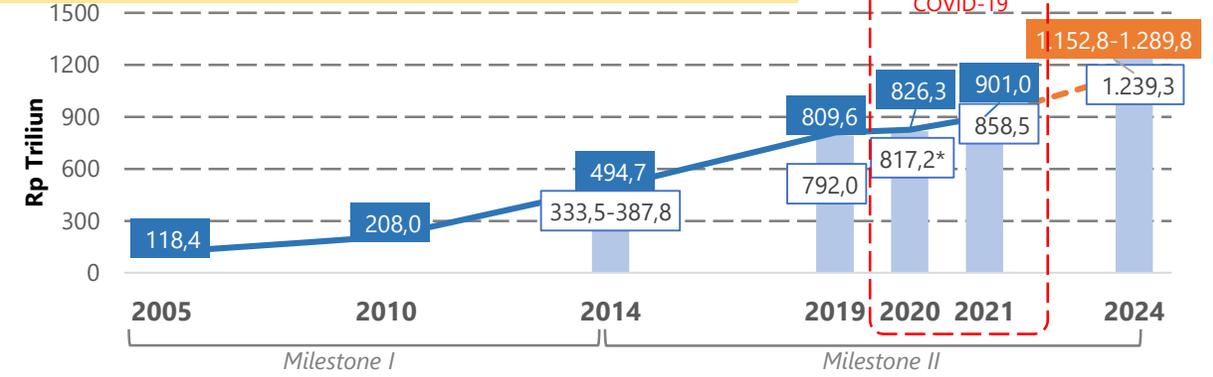


CAPAIAN KINERJA BIDANG EKONOMI (TERPILIH) PERIODE TAHUN 2005-2025

Devisa Pariwisata (Miliar USD)



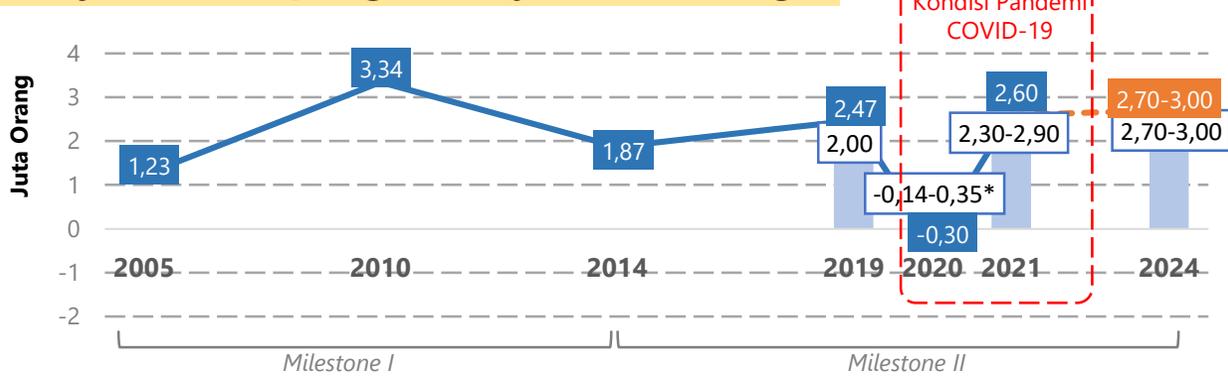
Realisasi PMA dan PMDN (Rp.Triliun)



*) Target penyesuaian kondisi pandemi COVID-19.

*) Target penyesuaian kondisi pandemi COVID-19.

Penyediaan Lapangan Kerja (Juta Orang)



*) Target penyesuaian kondisi pandemi COVID-19.

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (Persen)



*) Target penyesuaian kondisi pandemi COVID-19.

1. Pencapaian devisa pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan meski sempat menurun selama masa pandemi COVID-19.
2. Realisasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan dan selalu mencapai target, termasuk selama masa pandemi COVID-19 masih dalam kondisi terjaga.
3. Penyediaan lapangan kerja cenderung fluktuatif dan menunjukkan arah yang positif, namun berkontraksi selama masa pandemi COVID-19.
4. Pencapaian pertumbuhan ekspor nonmigas belum sepenuhnya mencapai target.

Berbagai upaya pemulihan ekonomi diharapkan mampu memulihkan kinerja sektor riil yang mencakup sektor pariwisata, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan ekspor nonmigas Indonesia sehingga dapat mencapai target tahun 2024.

ASPEK KOMPARASI

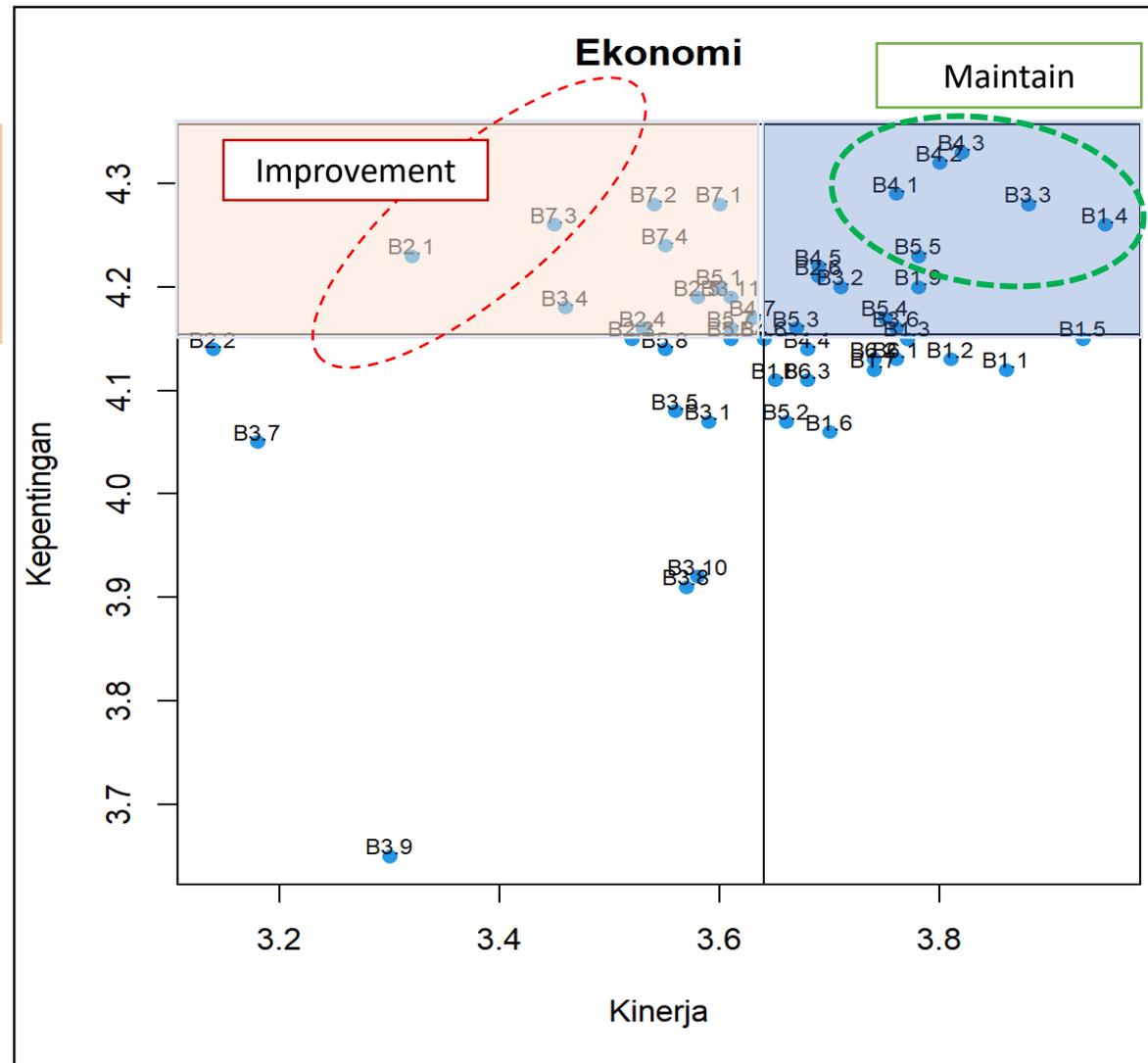


Kebijakan Penanggulangan dan Pengurangan Kemiskinan

Penekanan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat. b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha produktif masyarakat miskin. c. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. 	Meningkatkan kebijakan pendukung pengentasan kemiskinan beserta sistem evaluasinya yang melibatkan setiap tingkat pemerintahan.	Mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Praktik/ pembelajaran terbaik	<ul style="list-style-type: none"> a. Strategi kebijakan <i>pro-poor growth</i>. b. Pemberian subsidi pangan, pertanian, energi, maupun subsidi kredit program. c. Pemberian bantuan sosial. d. Program-program pemberdayaan masyarakat yang inklusif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kontribusi anggaran. b. Program stimulus ekonomi terbesar di dunia dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi global. c. Program pengentasan kemiskinan pedesaan yang komprehensif pada berbagai aspek kemiskinan. d. Sistem pelaporan elektronik untuk memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Model pembangunan ekonomi Thailand 4.0 untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. b. Mendorong kapasitas masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan penguatan keuangan mikro berdasarkan <i>Sufficiency Economy Philosophy</i> (SEP). c. Program <i>One Tambon One Product</i> (OTOP) menciptakan produk-produk berbasis kewilayahan bernilai ekonomi tinggi.

Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja

Penekanan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong pasar kerja yang fleksibel, termasuk upaya penurunan biaya ekonomi. b. Memfasilitasi agar pekerja dapat berpindah ke pekerjaan yang produktivitasnya lebih tinggi. 	Mengembangkan dan menumbuhkan industri yang merata di kawasan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan <i>livelihood</i> masyarakat dan stabilitas sosial.	Menciptakan aktivitas produksi dan layanan jasa baru.
Praktik/ pembelajaran terbaik	<ul style="list-style-type: none"> a. Strategi <i>pro-jobs</i>. b. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja. c. Peningkatan investasi yang membuka banyak lapangan pekerjaan baru. d. Peningkatan kapasitas dan kemampuan calon tenaga kerja dengan Kartu Prakerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penciptaan lapangan kerja baru di kawasan perkotaan yang mampu menyerap tenaga kerja pedesaan. b. Mengandalkan industri tersier dalam penciptaan lapangan pekerjaan. c. Pengembangan industri yang intensif tenaga kerja (<i>labor intensive</i>) dan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya tingkat pengangguran di Thailand. b. Percepatan pembangunan <i>Regional, Urban and Core Economic Area</i>. c. <i>Thailand Decent Work Country Programme</i> yang mempromosikan lingkungan kerja yang lebih baik dan produktif, perlindungan tenaga kerja, serta memperkuat tata kelola pasar tenaga kerja.



KINERJA KURANG BAIK (PERLU PERBAIKAN/ IMPROVEMENT)

B2.1 Ketersediaan lapangan pekerjaan.

B7.3 Kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.

KINERJA BAIK (PERLU DIPERTAHANKAN/ MAINTAIN)

B1.4 Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif.

B3.3 Keberadaan ekonomi digital untuk mendukung peningkatan ekspor.

B4.1 Pembinaan kewirausahaan bagi masyarakat.

B4.2 Dukungan penumbuhan wirausaha dan usaha baru (*start-up*) melalui regulasi dan program pemerintah.

B4.3 Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

B5.5 Terintegrasinya penerapan sistem perizinan usaha secara elektronik.

Sumber: Hasil Survei Persepsi Masyarakat atas Dampak/Manfaat Kebijakan Strategis RPJPN 2005-2025

HASIL PERKEMBANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN
(PERIODE 2005–2025)

HASIL PERSEPSI MASYARAKAT ATAS
MANFAAT PEMBANGUNAN
(PERIODE 2005–2025)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Ketenagakerjaan

Perkembangan kinerja indikator ketenagakerjaan cenderung meningkat. Masih diperlukan upaya percepatan dalam meningkatkan proporsi tenaga kerja formal.

Selain itu, perlu upaya strategis dalam hal meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Masyarakat menilai manfaat pembangunan ketenagakerjaan sudah baik dalam hal kualitas tenaga kerja yang semakin kompeten dan produktif.

Selain itu, masyarakat menilai manfaat pembangunan ketenagakerjaan masih perlu perbaikan dalam hal:

1. ketersediaan lapangan kerja;
2. ketersediaan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja;
3. kesesuaian program Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Pembangunan ketenagakerjaan selama pelaksanaan RPJPN 2005–2025 telah dinilai baik serta masyarakat telah merasakan kebermanfaatannya yang relatif baik pula.

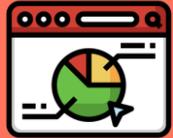
Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah

1. peningkatan kapasitas sektor produktif prioritas yang bernilai tambah tinggi;
2. perluasan kesempatan untuk menciptakan usaha baru dan penumbuhan investasi;
3. perluasan program dan kegiatan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

HASIL PERKEMBANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN
(PERIODE 2005–2025)

HASIL PERSEPSI MASYARAKAT ATAS
MANFAAT PEMBANGUNAN
(PERIODE 2005–2025)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Stabilitas Ekonomi dan Neraca Pembayaran

Perkembangan kinerja indikator stabilitas ekonomi dan neraca pembayaran cenderung **menurun**, sehingga perlu upaya strategis terutama dalam mendorong ekspor nonmigas dan penerimaan perpajakan. Selain itu, perlu terus dipertahankan kinerja yang sudah baik dalam hal cadangan devisa.

Masyarakat menilai manfaat pembangunan stabilitas ekonomi dan neraca pembayaran sudah **baik** dalam hal:

1. diplomasi perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekspor;
2. keberadaan ekonomi digital untuk mendukung peningkatan ekspor, pengembangan layanan pajak, kepabeanan, dan cukai serta PNBP.

Selain itu, masyarakat menilai manfaat pembangunan stabilitas ekonomi dan neraca pembayaran masih perlu perbaikan dalam hal:

1. stabilitas nilai tukar rupiah guna mendukung peningkatan ekspor;
2. kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan stabilitas ekonomi dan neraca pembayaran selama pelaksanaan RPJPN 2005–2025 masih membutuhkan upaya strategis untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Namun demikian, masyarakat telah merasakan kebermanfaatan pembangunan yang relatif baik.

Hal yang dapat terus ditingkatkan adalah

1. peningkatan penerimaan perpajakan;
2. peningkatan manajemen pengelolaan utang agar terkendali dalam jangka panjang dengan penguatan penerimaan negara;
3. peningkatan kemampuan ekspor.



1

Ke depan, **dokumen RPJPN masih diperlukan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen kerangka kelembagaan dan regulasi jangka panjang** dalam substansi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2

Dokumen RPJPN ke depan, perlu **mempertimbangkan pembelajaran bidang-bidang pembangunan yang relevan dengan dasar pemikiran menuju pertengahan abad ke-21** yaitu kondisi disrupsi teknologi dan ancaman pandemi yang mempengaruhi kelangsungan berbangsa dan bernegara.

3

Dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui **cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing bidang pembangunan**, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek.

4

Perlu ada **hierarki kerangka regulasi perencanaan** mulai dari jangka panjang (undang-undang), jangka menengah (peraturan pemerintah), dan jangka tahunan (peraturan presiden).

5

Perlu ada **mekanisme adjustment/penyesuaian pada periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan** (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi.

6

Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPN periode selanjutnya, perlu diimplementasikan **upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko** agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*.

7

Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPN, perlu disusun **pembabakan pembangunan lima tahunan yang futuristik, adaptif, dan berkesinambungan antarsetiap tahap pembangunan** demi tercapainya kemajuan peradaban jangka panjang.



TERIMA KASIH

pepps@bappenas.go.id





LAMPIRAN

METODE EVALUASI RPJPN 2005-2025

Mempertimbangkan sifat dokumen RPJPN 2005–2025 yang hanya memuat hal-hal umum dan mendasar (tidak mencantumkan indikator dan target kuantitatif), maka **dilakukan pemilihan kebijakan strategis dan sejumlah indikator kinerja pembangunan nasional yang dapat mewakili gambaran pelaksanaan pembangunan 20 tahun.**

1. Penentuan Indikator Terpilih Mewakili 9 Bidang Pembangunan

Rumusan awal indikator mewakili makro dan sembilan bidang pembangunan dipilih dengan **mempertimbangkan**

1. tingkat kepentingan indikator dalam menggambarkan kondisi pembangunan selama 20 tahun; serta
2. kelengkapan data target dan capaian selama dua *milestone* pembangunan yaitu *milestone* I (tahun 2005–2014) dan *milestone* II (tahun 2014–2024) yang mencakup kondisi pandemi COVID-19..

Rumusan awal kebijakan strategis dan indikator mewakili makro dan sembilan bidang pembangunan **dikonfirmasi dan disepakati oleh Deputi PJ dan Direktur PIC Bidang Pembangunan** (Tim Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025)

142 INDIKATOR TERPILIH

9 indikator makro dan 133 indikator 9 bidang pembangunan

2. Penentuan Kebijakan Strategis Terpilih Mewakili 9 Bidang Pembangunan

Rumusan awal kebijakan strategis mewakili sembilan bidang pembangunan dipilih dengan **mempertimbangkan**

1. arah kebijakan bidang pembangunan dalam dokumen RPJPN 2005-2025 dan dominasi arah kebijakan pada setiap dokumen RPJMN I-IV; serta
2. keberlanjutan kebijakan strategis pada setiap periode RPJMN dan tingkat kepentingan kebijakan strategis dalam menggambarkan kondisi pembangunan selama 20 tahun.

33 KEBIJAKAN STRATEGIS TERPILIH

mewakili sembilan bidang pembangunan



1

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN ... (1/2)

Trend Analysis

Analisis perkembangan kinerja selama 20 tahun periode RPJPN 2005–2025 terhadap sembilan bidang pembangunan

Membandingkan data antarwaktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu



Jika rata-rata perubahan bertambah disebut **tren positif** atau **tren cenderung meningkat**



Jika rata-rata perubahan berkurang disebut **tren negatif** atau **tren cenderung menurun**



Kelompok Analisis 1

Ketersediaan data dan informasi serta histori data yang relatif konsisten, yaitu berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada tahun 2024.

Terdapat empat kategori hasil perhitungan

- 1) **Menurun**, jika perkembangan kinerja < 0 persen.
- 2) **Stagnan**, jika perkembangan kinerja 0–15 persen.
- 3) **Meningkat**:
 - a) **moderat**, jika perkembangan kinerja > 15 – < 100 persen.
 - b) **on the track**, jika perkembangan kinerja ≥ 100 persen.



Kelompok Analisis 2

Ketersediaan data dan informasi yang terbatas serta histori data yang kurang konsisten (seperti tidak tersedianya data hasil akhir yang diharapkan pada tahun 2024), yaitu hanya berdasarkan perhitungan pertumbuhan tahunan rata-rata hingga periode terkini (misalnya tahun 2005–2021).

Terdapat tiga kategori hasil perhitungan

- 1) **Menurun**, jika perkembangan kinerja < 0 persen.
- 2) **Stagnan**, jika perkembangan kinerja 0 persen.
- 3) **Meningkat (relatif)**, jika perkembangan kinerja > 0 persen.
- 4) **Belum dapat disimpulkan**, jika data tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat perbedaan satuan indikator antartahun.

1

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN ... (2/2)

Trend Analysis

Analisis perkembangan kinerja selama 20 tahun periode RPJPN 2005–2025 terhadap sembilan bidang pembangunan

	Kategori	Keterangan	Simpulan
1	Menurun	Perkembangan kinerja pembangunan menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun <i>baseline</i> , baik terhadap kondisi terkini maupun kondisi akhir yang diharapkan.	Perlu Upaya Strategis
2	Stagnan	Perkembangan kinerja pembangunan menunjukkan kecenderungan a. Stagnan/tidak berubah dari tahun <i>baseline</i> terhadap kondisi terkini; dan b. Stagnan/sedikit meningkat dari tahun <i>baseline</i> terhadap kondisi akhir yang diharapkan.	Perlu Upaya Strategis
3	Meningkat		
	a. Moderat	Perkembangan kinerja pembangunan telah menunjukkan kecenderungan meningkat namun diperkirakan masih belum dapat memenuhi hasil akhir yang diharapkan.	Perlu Upaya Percepatan
	b. On The Track	Perkembangan kinerja pembangunan menunjukkan kecenderungan meningkat dan diperkirakan mampu memenuhi hasil akhir yang diharapkan.	Pertahankan Kinerja
	c. Relatif (hingga Kondisi Terkini)	Perkembangan kinerja pembangunan menunjukkan kecenderungan meningkat relatif dari tahun <i>baseline</i> terhadap kondisi terkini.	
4	Belum Dapat Disimpulkan	Perkembangan kinerja pembangunan belum dapat ditentukan pola kecenderungannya.	

2

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN STRATEGIS

Pendalaman dilakukan dengan *benchmarking* (studi komparasi *best practice*) dengan negara lain



CHINA



THAILAND

Pemilihan negara *best practice* mempertimbangkan karakteristik yang mirip dengan Indonesia dan memiliki fokus pemerataan ekonomi di seluruh sektor dan wilayah.

ANALISIS DESKRIPTIF

- (1) Pelaksanaan;
- (2) Latar Belakang;
- (3) Organisasi/ Kelembagaan;
- (4) Regulasi;
- (5) *Input-Aktivitas-Output*

3

EVALUASI DAMPAK/MANFAAT KEBIJAKAN STRATEGIS

PENGUMPULAN DATA

Survei persepsi (kuesioner *online* dan *offline*)

KATEGORI RESPONDEN



**Rumah
Tangga**



**Pelaku
Usaha**



Birokrat



Akademisi

TOTAL RESPONDEN

1.927 orang

METODE ANALISIS

Importance Performance Analysis (IPA)

Tingkat kinerja dan kepentingan diukur dengan skala semantic differential pada skor 1-5 dengan keluaran Diagram Kartesius (4 kuadran prioritas perbaikan kinerja)